



PROGRAM PERLINDUNGAN KAWASAN PESISIR BERBASIS MASYARAKAT DI NEGERI BUANO UTARA

Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM)



LAPORAN AKHIR PROGRAM
(Februari 2016-Januari 2017)

I. INFORMASI PROGRAM

Wilayah Pendanaan	:	Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku
KBA	:	Kasa Kelang Buano
Strategic Direction	:	Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut
Nama Proyek	:	Perlindungan Kawasan Pesisir Berbasis Masyarakat di Negeri Buano Utara
Nomor Laporan	:	02
Periode waktu	:	Februari 2017 – Januari 2017 (12 bulan)
Disampaikan oleh	:	Noni R Tuharea (Koordinator Program)
Tanggal	:	15 Februari, 2017

Hibah CEPF:

(a) dalam USD: 20.000

(b) dalam mata uang lokal (Rp) : 260.000.000,-

Kontribusi Mitra berupa *In kind* : Meliputi alokasi staff, kantor dan perlengkapan pendukung kerja

Kontribusi donor (program) lain (jika ada) : -

Periode program : 01 Februari 2016 – 31 Januari 2017

Lembaga pelaksana (mitra) : Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM)

II. RINGKASAN

LPPM sebagai salah satu LSM lokal di Maluku selama kurang lebih satu tahun telah berupaya dengan semangat dan komitmen yang tinggi telah merampungkan seluruh aktivitas **Program Perlindungan Kawasan Pesisir berbasis masyarakat di Negeri Buano Utara** selama kurang lebih 12 bulan yang terintegrasi dalam 2 keluaran dan sejumlah aktivitas program yaitu:

1. Sosialisasi gagasan tentang perumusan aturan lokal pengelolaan wilayah pesisir
2. Melakukan kajian partisipatif
3. Memfasilitasi penyusunan aturan lokal di tingkat Negeri terkait pengelolaan dan perlindungan sumber daya pesisir berbasis masyarakat
4. Melakukan uji publik draft aturan lokal tentang Perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir bagi stakeholders pemerintah dan masyarakat
5. Finalisasi aturan lokal
6. Membentuk kelompok perlindungan kawasan pesisir (KPS)
7. Melakukan penyadartahuan untuk mendorong pengawasan dan perlindungan kawasan pesisir secara partisipatif di Buano Utara
8. Melaksanakan pelatihan vokasional pengelolaan sumber daya pesisir lingkungan berkelanjutan

Sesuai dengan perencanaan program dalam durasi satu tahun yang terselenggara atas dukungan dana dari **Critical Ekcosystem Partnersip Fund** melalui **Burung Indonesia** maka, jabaran strategi program ini telah dilaksanakan secara konferhensif dan terarah sesuai rencana kerja yang dikembangkan, meski demikian dalam perjalanan implementasinya terdapat penyesuaian-penyesuaian baik strategi maupun pada workplan dan jadwal tentatif pada beberapa aktivitas program di lapangan.

Dari perjalanan implementasi program ini, ada sejumlah kemajuan yang dicapai yaitu kemampuan lembaga untuk mempengaruhi parah tokoh adat (kepala soa), unsur pemerintah negeri dan BPD sehingga diperoleh kesepakatan bersama baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk *commitment letter* untuk berpartisipasi dan terlibat dalam implementasi program Perlindungan kawasan pesisir berbasis masyarakat di Negeri Bunano utara. Menguatnya kapasitas internal lembaga baik staf program an administrasi keuangan melalui pendampingan dari Burung Indonesia maupun staf senior sehingga semakin meningkatkan mutu program perlindungan dan pengawasan pesisir Negeri Buano Utara. Secara umum implementasi program berjalan dengan baik.

Tersosialisasinya gagasan tentang perumusan aturan lokal pengelolaan wilayah pesisir kepada pemerintah Negeri, tokoh adat dan masyarakat melalui serangkaian kunjungan pertemuan formal maupun informal secara langsung maupun melalui surat-menyurat, audiance dengan berbagai pihak baik di tingkat Negeri Buano Utara maupun pemerintah Provinsi/Kabupaten.

Untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi serta kawasan pesisir, maka dilakukan satu kajian partisipatif dengan melibatkan stakeholder di Negeri Buano Utara, melalui kegiatan tersebut masyarakat dapat mampu mengetahui dan memahami situasi dan kondisi sosial ekonomi serta pesisir di buano Utara. Kegiatan *diskusi terfokus* di 4 dusun, wawancara mendalam dan *pemetaan kondisi pesisir* yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat membantu mereka untuk mengetahui kondisi sebenarnya lingkungan mereka maupun oleh Tim dari LIPI Ambon. Kondisi sosial ekonomi dan data potensi yang ada sudah mampu memberikan gambaran secara umum dan sekaligus membantu tim menyusun rancangan aturan lokal serta merancang pelatihan vokasional yang relevan. Kebiasaan memotong mangrove untuk keperluan rumah tangga, bom/potasium yang merupakan praktek masyarakat untuk mendapat ikan secara instan, pemanfaatan lahan/laut yang tidak terkontrol serta hasil tangkapan yang semakin berkurang dan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan telah memberikan kontribusi nyata adanya praktek penangkapan yang merusak lingkungan pesisir.

Melalui sejumlah permasalahan diatas maka kebutuhan akan sebuah aturan untuk melindungi pesisir menjadi sangat penting dilakukan. Berdasarkan data diatas, maka masyarakat bersepakat untuk menyusun satu aturan lokal tentang Pengelolaan dan perlindungan sumber daya pesisir berbasis masyarakat. Tahapan penyusunan dimulai dengan menunjuk Tim dari berbagai unsur di Negeri Buano Utara, dilakukan workshop penyusunan rancangan aturan lokal yang diawali dengan sosialisasi hasil kajian partisipatif (hasil pemetaan dan kajian partisipatif). Setelah menyelesaikan draf aturan lokal tersebut, perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan uji publik ke masyarakat dan pemerintah negeri beserta tokoh adat di masing-masing lokasi (4 dusun dan negeri induk). Masukan dari serangkaian kegiatan uji publik tersebut, dilakukan perbaikan draf aturan lokal melalui workshop finalisasi aturan lokal di tingkat Negeri yang dihadiri oleh perangkat pemerintah Negeri dan Tokoh adat sekaligus menyerahkan draf aturan lokal secara resmi kepada pemerintah Negeri untuk ditindaklanjuti dalam bentuk penetapan dan penandatangiannya oleh Raja Negeri dan BPD Buano Utara. Meskipun belum ditanda tangan Raja Negeri Buano Utara, namun rancangan perneg sedikit banyak telah mampu mengurangi aktifitas merusak pesisir, namun sejauh hasil pantauan tim pengawas pesisir kegiatan penebangan bakau telah berkurang, hanya masyarakat dusun Pulau Kasuari yang masih melakukan penebangan untuk kebutuhan kayu bakar. Bom/potas, secara umum masyarakat tidak lagi mendengar dan atau melihat pegeboman di wilayah mereka.

Melalui KPS kegiatan pencegahan telah dilakukan di hampir semua wilayah pesisir Buano utara. KPS yang terbentuk dan memiliki struktur di 4 dusun dan Negeri induk telah mendapat pelatihan penguatan kapasitasnya tentang pengawasan pesisir dan pengorganisasian kelompok meskipun tanda legalitas dari Negeri berupa surat rekomendasi belum dimiliki sampai berakhirnya akhirnya program ini. Meski begitu peran mereka telah memberikan kontribusi positif terkait upaya menjaga pesisir Buano utara. KPS telah memiliki rencana aksi dan format pendokumentasian laporan yang baik.

Aksi penyadartahuan telah berjalan meskipun belum maksimal. KPS telah mengorganisir pihak sekolah dasar di wilayahnya masing-masing untuk menanam mangrove, mendatangkan narasumber dari Badan Lingkungan Hidup dan DKP SBB dalam diskusi-diskusi tematik di 4 dusun dan Negeri induk. Brosur dan poster telah dirancang/Negeri/cetak dan distribusikan kepada masyarakat dan instansi/badan terkait, hasil survey cepat menunjukkan bahwa aktivitas penebangan bakau berkurang hingga 80% di Dusun Naiselan, Anauni dan Huhua. Masyarakat mengetahui fungsi karang, mangrove dan lamun sehingga kegiatan merusak mulai berkurang.

Untuk mengurangi aktivitas masyarakat dalam melakukan penangkapan dan atau pengrusakan bakau/karang, maka telah dilakukan pelatihan vokasional berupa kerambah jaring apung dan pembesaran kepiting kepada masyarakat yang sangat berpotensi merusak dan secara ekonomi sangat rentan miskin dan tidak memiliki akses. Untuk itu pelatihan vokasional ini telah mampu mengalihkan perhatian mereka untuk berwirausaha dengan memanfaatkan sumber daya pesisir yang ada di lingkungan mereka sendiri. Kelompok usah hasil Pelatihan vokasional saat ini telah dihubungkan ke pemerintah kabupaten/provinsi untuk mendapat pendampingan sekaligus memudahkan akses mereka terhadap bantuan dan pendampingan oleh pemerintah setempat. Usaha untuk mendapatkan kartu budidaya, surat legitimasi dari pemerintah negeri terus diupayakan.

Tersedianya rancangan aturan negeri dan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir dan tertingkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir maka secara langsung berdampak pada perlindungan habitat kawasan pesisir Negeri Buano Utara.

III. CAPAIAN PROGRAM

A. Objective : Habitat di pesisir negeri buano Utara akan lebih terlindungi dengan partisipasi masyarakat

Objective telah dicapai oleh program dengan terpenuhinya indikator sebagai berikut :

1. Adanya aturan lokal tentang pengelolaan dan perlindungan pesisir yang disepakati oleh masyarakat Negeri.
2. Meningkatnya kapasitas lokal dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir

Indikator 1: Adanya aturan lokal tentang pengelolaan dan perlindungan pesisir yang disepakati oleh masyarakat Negeri. Selama periode kwartal 1 LPPM bersama pemerintah dan masyarakat telah berhasil melakukan tahapan penyusunan aturan lokal/Peraturan Negeri secara partisipatif dengan sejumlah tahapan dengan pertama-tama melakukan sosialisasi tentang pentingnya dibuat aturan lokal/Pernege kepada pemerintah dan masyarakat Buano Utara untuk pengelolaan dan perlindungan pesisir berbasis masyarakat melakukan kajian partisipatif melalui FGD, wawancara mendalam, pemetaan potensi dan pesisir Negeri Buano Utara, menyusun draf peraturan lokal, uji publik draf peraturan lokal dan finalisasi dan penyerahan draf ke pemerintah negeri. Laporan monitoring, draf peraturan lokal dan data pendapatan dan sosial Buano Utara.

Indikator 2: Meningkatnya kapasitas lokal dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Indikator ini dicapai melalui serangkaian aktivitas yang dimulai dengan pelatihan dan pembentukan Kelompok Pengawas PeSisir (KPS) Negeri Buano Utara yang tersebar di 5 wilayah, masing-masing Dusun Huhua, Anauni, Pulau Kasuari, Naiselan dan Negeri Besar. Pasca pembentukan KPS kemudian menginisiasi beberapa aktivitas bersama masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran untuk melindungi kawasan pesisir, yaitu Penanaman mangrove yang bekerjasama dengan Sekolah dasar di Huhua, Naiselan dan Pulau Tea; 5x diskusi tematik masing-masing 1x di 5 wilayah dengan menghadirkan narasumber dari DKP dan BLH Kab. SBB; serta Pengawasan pemanfaatan mangrove dan penangkapan ikan. Guna mendukung aktivitas KPS LPPM juga telah mencetak 1000exp. brosur dan 2 jenis poster masing-masing sebanyak 100 exp. Untuk menekan aktivitas pengrusakan kawasan pesisir maka LPPM telah melakukan 2 pelatihan vokasi masing-masing Pelatihan Budidaya Ikan kerambah Jaring Apung dan Pembesaran Kepiting. yang diikuti oleh 58 orang.

B. Output

Output 1: Telah berhasil dicapai selama masa pelaksanaan program, yakni: ***Tersedia aturan lokal pengelolaan dan perlindungan pesisir di Pulau Buano Utara. Indikator output 1*** “Adanya Aturan lokal tentang pengelolaan wilayah pesisir yang telah dibahas dan disepakati oleh masyarakat Negeri paling lambat bulan V dan siap diimplementasikan. Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan beberapa aktivitas yaitu;

Aktivitas 1.1: Sosialisasi gagasan tentang perumusan aturan lokal pengelolaan wilayah pesisir.

Sosialisasi program kepada pemerintah dan masyarakat **telah selesai** dilaksanakan oleh LPPM melalui kunjungan awal ke lokasi program untuk memperkenalkan lembaga dan sekaligus mengsosialisasikan adanya rencana implementasi **Program Perlindungan kawasan pesisir berbasis masyarakat di Buano Utara**. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan kepada pemerintah Negeri Buano Utara, Pemerintah Kabupaten SBB dan Kepala-kepala Soa. Dilakukan secara terpisah melalui kunjungan langsung (*audiance*), dengan masing-masing pihak:

1. Berkunjung ke DKP Provinsi Maluku di Ambon dan DKP SBB di Piru dan bertemu serta beraudiance dengan masing-masing: **Bapak Abdul Haris** (Kabid KPPP di kantor DKP Provinsi Maluku), berlangsung pada Tanggal 22 Februari 2016 dan **Bapak Paulus R Sesa** (Kabid Budidaya) di kantor DKP SBB yang berlangsung pada tanggal 29 Februari 2016. Kedua pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan rencana implementasi program, serta meminta dan mengidentifikasi bentuk dukungan dan kontribusi serta senengitas program yang dijalankan LPPM dengan DKP Kabupaten dan Provinsi
2. Koordinasi dengan pemerintah negeri dan pemuka-pemuka adat. Koordinasi Raja Negeri Buano di Buano Utara dilakukan di kediaman Raja. Raja menyarankan LPPM agar berkoordinasi dengan kepala-kepala soa karena kesibukan menghadapi masalah gugatan yang status Raja di PTUN.
3. Pertemuan dengan Kepala-kepala Soa. Pertemuan ini masing-masing dengan Kepala Soa Rulette, Tamalene, Hitimala, Tuhuteru dan Ola pada tanggal 23 Februari 2017 secara terpisah di kediaman masing-masing.
4. Pertemuan secara terpisah juga dilakukan dengan kepala-kepala Dusun Huhua, Anauni, Pulau Kasuari dan Naiselan berlangsung pada tanggal 23 Februari 2016. Pertemuan/audiance ini berlangsung secara terpisah.
5. Pertemuan dengan masyarakat dusun Huhua dilakukan pada tanggal 3 Maret 2016 bertempat di Sekretariat LPPM. Tujuannya untuk meminta keterlibatan dan dukungan masyarakat selama LPPM tinggal di Huhua.

Dukungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program ditunjukkan dengan menerima dan menyatakan untuk siap kesiapan dan terlibat mendukung program yang akan dijalankan. Hasil yang dicapai pada bagian ini adalah masyarakat menerima dan menyatakan dukungannya secara lisan. 4 kepala dusun dan pemerintah Negeri Induk menyatakan kesediaannya secara lisan, 5 kepala Soa memberikan surat komitmen mereka untuk mendukung pelaksanaan program.

(Daftar hadir, dokumentasi foto-foto, surat pernyataan dukungan, notulensi pertemuan dapat dilihat pada laporan kegiatan)

Aktivitas 1.2: Melaksanakan kajian partisipatif

Kajian partisipatif **telah selesai dilaksanakan** oleh LPPM bersama-sama masyarakat/tokoh adat, LIPI dan Universitas Pattimura Ambon. Dalam perencanaan program kajian partisipatif ini dilakukan dengan metode diskusi kampung yang bertujuan untuk menginventarisir berbagai masalah dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir. Namun kegiatan ini dirasa belum cukup memenuhi kebutuhan data penyusunan rancangan peraturan negeri. Karena itu LPPM menyesuaikan bagian ini dengan melakukan pemetaan fisik kawasan pesisir dan wawancara mendalam terlebih dahulu sebelum

melakukan diskusi kampung. Temuan pemetaan fisik dan wawancara mendalam kemudian diklarifikasi oleh masyarakat pada saat diskusi kampung dengan berbagai informasi lainnya. Seluruh proses kajian partisipatif ini dilakukan dengan melibatkan kurang lebih **156 orang**.

Lebih rinci rincian aktivitas kajian partisipatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam bertujuan untuk menginventarisir kondisi sosial, ekonomi dan permasalahan pesisir Buano Utara. Hasilnya digunakan untuk penyusunan aturan lokal tentang perlindungan kawasan pesisir. Kegiatan ini dimulai dengan menNegeriin kusioner dan menentukan responden. Kuisisioner memuat 5 isu penting terkait perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir, yaitu

1. Kondisi Sosial dan Ekonomi
2. Pengetahuan tentang Kawasan Pesisir
3. Persepsi tentang pengelolaan ekosistem dan sumber daya perairan
4. Aturan/kebijakan pengelolaan kawasan pesisir
5. Persepsi terhadap pengembangan daerah perlindungan laut (DPL)

Wawancara mendalam dilakukan oleh 5 orang staf terdiri dari 3 staf program dan 2 orang staf LPPM, yang berlangsung pada tanggal 01-07 Maret 2016, dengan mewawancarai 71 orang.

Wawancara berlangsung di Buano Utara (Dusun Naiselan, Anauni, Huhua, Pulau Kasuari dan Negeri Induk). Responden dalam wawancara ini berjumlah 71 orang, 5 pewawancara Rangkaian kegiatan dari tahapan persiapan sampai dengan wawancara berlangsung selama 7 hari dari tanggal 01-07 Maret 2016.

Hasil yang ditemui dalam kegiatan wawancara mendalam ini ternyata menemukan bahwa :

1. Rata-rata tingkat Pendidikan responden sangat rendah karena hanya lulus Sekolah Dasar (SD). Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap pengetahuan tentang fungsi habitat di kawasan pesisir dan bagaimana menjaga kelestariannya. Mereka beranggapan bahwa tugas menjaga pesisir bukan mereka saja, tetapi pemerintah yang harus lebih berperan, karena ternyata masih banyak masyarakat yang memotong mangrove, menggunakan alat penangkapan dan menangkap ikan secara tidak bertanggung jawab seperti bom, bus tetapi tidak ada yang melarang.
2. Fungsi dan tugas *kewang* saat ini hampir tidak kelihatan. Kewang hanya berfungsi sebagai Petugas penagih pendapatan (*income*) kepada kepala Soa
3. Tidak ada aturan baik oleh pemerintah negeri maupun Soa untuk menjaga kawasan pesisir.
4. Aparat keamanan/ pemerintah Kabupaten tidak pernah melakukan koordinasi dengan pemerintah negeri untuk melakukan pengawasan, mereka masih berjalan sendiri-sendiri.
5. Aparat keamanan dicurigai oleh masyarakat juga sebagai bagian yang terlibat dan bahkan melindungi pembom dan bus ikan.
6. Pengusaha ikan juga sering menutup mata dan tidak mempedulikan masalah cara penangkapan ikan.

Secara umum responden mengatakan bahwa kondisi kawasan pesisir dalam 5 tahun terakhir sangat berbeda jauh dengan 5 tahun sebelumnya, hal ini ditandai dengan semakin rusaknya terumbu karang dan sulitnya mencari dan mendapatkan ikan karang.

2. Pemetaan Fisik

Pemetaan fisik dilakukan oleh 4 orang peneliti dari LIPI Ambon dan Universitas Pattimura, berlangsung pada tanggal 12-14 April 2016. Tim LIPI didampingi oleh 1 orang kewang dan 3 orang perwakilan masyarakat dusun Huhua serta 3 staf LPPM. Lokasi pemetaan masing-masing untuk Mangrove berlangsung pada 3 titik yang berada di Selat Valantine, Pulau Pua, dan Dusun Naiselan. Titik penelitian terumbu karang dan ikan berlangsung pada 6 titik masing-masing di Enapanan Nusa Pua, Pulau Kasuari, Dusun Naiselan, Nusa Esuna, Nusa Mananut. Sedangkan untuk Lamun dilakukan pada 2 titik masing-masing di Dusun Anauni dan Naiselan, untuk lamun ternyata hasil penelitian tidak banyak yang dapat diungkapkan karena pada saat penelitian lamun tidak terlalu banyak hal ini disebabkan karena kondisi lamun di lokasi penelitian bertumbuh sesuai musim.

Hasil pemetaan fisik ini dapat digambarkan sebagai berikut:

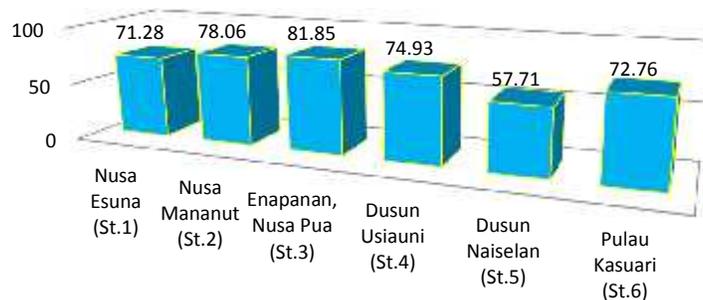
- Mangrove: Pemantauan kondisi tutupan mangrove, identifikasi jenis-jenis beserta asosiasinya memantau kerusakan langsung di lokasi yang telah ditentukan, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel presentasi tutupan hutan mangrove						
No	Stasiun	Negeri/ Pulau	Σ Jenis Dalam Plot	Jenis Dominan	% Tutupan	Status
1	Huhua	Usiauni 1	1	<i>Rhizophora mucronata</i>	80,50 ± 3,46	Padat
2	Huhua	Usiauni 2	1	<i>Rhizophora apiculata</i>	65,25 ± 13,29	Sedang
3	P. Pua	Apa	2	<i>Rhizophora apiculata</i>	77,70 ± 5,12	Padat
4	Naeselan	Naeselan	1	<i>Rhizophora mucronata</i>	83,01 ± 2,98	Padat
Total					76,61 ± 6,21	Padat

Catatan: pada lokasi usiauni 2 di Huhua, kondisi status kerusakannya sedang diakibatkan karena ada aktivitas penebangan kayu mangrove untuk pemanfaatan lahan pemukiman dan masyarakat menggunakan mangrove sebagai bahan kayu bakar.

- Karang: Penelitian tumbu karang dilakukan pada 6 lokasi titik/lokasi menemukan hasilnya adalah Dusun Naiselang, P. Buano (St.6). tutupan terumbu karang pada lokasi-lokasi ini masuk dalam kategori masih sangat baik, berikut ini table

Grafik Persentase Tutupan Karang Karang Di Lokasi Penelitian



- **Ikan:** Pengamatan ikan karang dengan menggunakan metode LIT berlangsung pada lima lokasi. Hasilnya ada kurang lebih sebanyak 198 spesies, 2169 individu dan 27 famili ikan karang tersensus. Persentase jenis dari masing-masing kelompok menurut kategori monitoring ikan karang untuk kelompok ikan Indikator dijumpai sebesar 8,58 % dengan jumlah spesies sebesar (17 spesies), kelompok ikan Mayor sebesar 62,63 % (124 spesies) dan kelompok ikan Target sebesar 28,78 % (57 spesies). Persentase individu masing-masing kelompok ikan indikator 132 individu (6,08 %), kelompok target 630 individu (29,05) dan kelompok major 1407 individu (64,87 %). Berikut ini adalah tabel hasil.



3. Diskusi Kampung.

Diskusi kampung dilaksanakan oleh LPPM bersama dengan pemerintah Negeri dan Kepala-kepala Dusun. Kegiatan diskusi kampung ini dimulai dengan mengembangkan panduan diskusi sebagai acuan dan merumuskan isu-isu penting yang berhubungan dengan kondisi kekinian kawasan pesisir di Negeri Buano Utara terutama Peran pemangku kepentingan serta pelaku usaha perikanan terkait perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir. Diskusi kampung ini juga sekaligus bertujuan untuk mengklarifikasi temuan-temuan pada wawancara mendalam dan hasilnya menjadi referensi dalam penyusunan kesepakatan lokal. Surat pemberitahuan sekaligus undangan beserta ToR dan jadwal diskusi dikirim ke masing-masing dusun untuk selanjutnya melakukan pertemuan.

Berdasarkan LFA diskusi kampung hanya dilakukan sebanyak 3x, namun dalam pelaksanaannya LPPM telah berhasil melakukan sebanyak 4x. hal ini dengan mempertimbangkan keterwakilan dusun. Pelaksanaan diskusi kampung berlangsung selama 3 hari. Peserta yang hadir dalam pertemuan ini berjumlah 74 orang dengan latar belakang peserta adalah dari Nelayan, pengusaha ikan dll.

Tanggal	Lokasi (dusun)	Jumlah Peserta		
		Laki-laki	Perempuan	Total
14 Maret	Anauni	14	6	20
15 Maret	Naiselang	11	3	14
	Pulau Kasuari	11	9	20
16 Maret	Huhua	17	3	20

Diskusi kampung ini dilakukan dengan metode fokus grup diskusi (FGD), dengan fokus pada 5 komponen pertanyaan kunci yaitu:

- Persepsi tentang pemanfaatan Kawasan pesisir
- Persepsi tentang pengelolaan pesisir berkelanjutan
- Persepsi tentang partisipasi masyarakat dalam perlindungan kawasan peisir

- Inisiasi kolaborasi kelompok masyarakat dengan para pihak dalam program perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir
- Peraturan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Pesisir

Hasil temuan selama diskusi di 4 dusun, berdasarkan komponen-komponen pertanyaan di atas oleh peserta mengatakan bahwa: a). Jika Laut rusak, masyarakat akan kesulitan mendapat sumber makanan, pendapatan dan kehidupan, b). Tidak adanya peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan kawasan pesisir, c). Partisipasi masyarakat untuk pelestarian kawasan pesisir, hanya melalui kegiatan-kegiatan yang sangat terbatas dengan sumber daya yang terbatas pula, d). Ada kebiasaan turun temurun dalam praktek perlindungan alam, yaitu melalui pengawasan oleh Kewang dan budaya “Sasi” tetapi hal ini juga belum secara maksimal berjalan, misalkan Kewang terkadang tidak berfungsi baik dan cenderung hanya menjaga wilayah daratan saja, aturan adat berfungsi maksimal, e). Tidak ada/belum terlihat sama sekali ada koordinasi lintas sektor untuk melakukan perlindungan kawasan pesisir di perairan Pulau Buano. ***(Daftar hadir, foto, notulensi pertemuan dan catatan kompilasi hasil diskusi dapat dilihat pada laporan hasil kajian)***

Aktivitas 1.3: Memfasilitasi penyusunan aturan lokal di tingkat Negeri terkait pengelolaan dan perlindungan sumber daya pesisir berbasis masyarakat

Berdasarkan hasil kajian partisipatif, selanjutnya secara internal didiskusikan struktur awal rancangan aturan lokal. Rancangan ini dimaksudkan untuk membantu tim penyusun nantinya dalam merumuskan konsideran dan konten aturan lokal sehingga dapat memenuhi unsur-unsur sebuah aturan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama di Negeri adat.

Untuk maksud ini, Tim LPPM melakukan identifikasi dan mengumpulkan beberapa literature dan peraturan-peraturan sejenis yang pernah ada di Maluku, tim juga berkunjung ke Universitas Pattimura untuk berdiskusi dengan pakar hukum adat sekaligus meminta masukan dan pandangan akademiknya terkait aturan lokal di sebuah negeri Adat seperti Buano Utara, harapannya agar dalam penyusunan draf aturan lokal nantinya bersesuaian dengan hukum-hukum positif dan kebiasaan masyarakat adat. Referensi serta masukan dari diskusi tersebut selanjutnya digunakan tim LPPM untuk memulai menyusun rancangan draf aturan lokal. Draf beserta petunjuk penyusunan selesai dibuat selanjutnya dibawa ke Buano dalam workshop penyusunan aturan lokal.

Penyusunan draf aturan lokal Perlindungan Kawasan Pesisir Berbasis Masyarakat di Buano Utara dilangsungkan dalam bentuk workshop. Workshop ini diawali dengan sosialisasi hasil kajian partisipatif (pemetaan fisik), Daerah Perlindungan Laut (DPL) untuk kelangsungan habitat di Kawasan Pesisir dan memaparkan perkembangan program kepada peserta. Materi sosialisasi ini nantinya akan digunakan sebagai referensi tim dalam menyusun draf aturan lokal, juga berkaitan dengan diperlukannya persetujuan masyarakat dan kepala desa untuk menutup sebagian wilayah laut sebagai daerah perlindungan (DPL). Sosialisasi hasil kajian ini berlangsung selama setengah hari di PKBM Puan Mandiri, difasilitasi oleh **Daniel Pelasula (staf LIPI Ambon), Piet Wairissal dan Noni Tuharea, dan diikuti oleh 14 orang** peserta yang mewakili Pemerintah negeri, Tokoh Adat, Perwakilan BPD, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan. Workshop memberikan perspektif yang baru kepada peserta tentang bagaimana pengelolaan dan perlindungan kawasan pesisir dikelola. Selain itu juga dalam workshop ini masyarakat

melalui pemuka adat menyetujui penutupan sebagian wilayah laut sebagai DPL, yaitu pada Nusa Esuna dan Nusa Mananaut yang terletak di sebelah barat pulau Buano.

Consensus ini menjadi dasar penting bagi TIM Penyusun untuk memasukan kedua Nusa (pulau) tersebut sebagai muatan penting rancangan aturan local. Tim penyusun beranggotakan **7 orang** dari **5 orang** peserta yang direncanakan di LFA, selama dua setengah hari (20-22 April) berhasil menyusun draf aturan loral tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Berbasis Masyarakat Negeri Buano Utara”. Dengan menggunakan panduan serta draf aturan lokal yang telah disusun serta hasil kajian partisipatif. Tim penyusun berhasil merumuskan isi aturan lokal dengan membagasnya secara bertahap yang dimulai dengan memberikan Judul, bagian Membaca, Menimbang, Mengingat, Persetujuan, bagian Menetapkan/memutuskan dan penutupan. Sampai akhir workshop, satu draf aturan lokal yang terdiri dari **13 Bab** dan **30 Pasal** telah berhasil dibuat dan siap untuk diujipublikan.

Penentuan lokasi dan batas-batas DPL termuat dalam rancangan Peraturan Lokal, dengan luasan zona inti adalah **150 meter** dari Tebing batu dan Zona Penyangga adalah **150 meter** dari batas Zona inti, sehingga total DPL ada **300 meter**. Sedangkan di **Nusa Te’a** juga ditetapkan sebagai kawasan wisata bahari, sedangkan di **Nusa Pua** dan **Selat Valentine** ditetapkan menjadi kawasan pemanfaatan terbatas. Untuk daerah perlindungan pantai ditetapkan dalam peraturan lokal berada pada seluruh pesisir pantai negeri Buano Utara dengan jarak **100 meter** ke darat dan **50 meter** ke arah laut.

Catatan penting dari workshop pmenyusun aturan lokal ini adalah selain penjelasan Bab per Bab dan Pasal per Pasal, rancangan peraturan ini juga mengamanatkan beberapa aturan tambahan/turunan yang nantinya bermanfaat untuk disusun sebagai aturan lokal Negeri Buano nantinya. Aturan ini tidak hanya mengatur tentang perlindungan tetapi juga pengelolaan kawasan pesisir sebagaimana yang telah berlangsung secara turun temurun di Negeri Buano. *(Lihat rancangan aturan local #1)*

Aktivitas 1.4: Melakukan uji publik draft aturan lokal tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir bagi stakeholder pemerintah dan masyarakat

Konsultasi publik terhadap draf aturan lokal telah dilaksanakan sebanyak 4x di tingkat dusun pada bulan III program. Kegiatan konsultasi publik ini berlangsung di masing-masing dusun dan difasilitasi oleh 1 orang fasilitator masing-masing dengan peserta sebanyak **81 orang** yang terdiri dari Perangkat Dusun, tokoh-tokoh masyarakat/agama dan tokoh adat.

Lokasi, Tanggal dan peserta konsultasi publik draf aturan lokal				
Tanggal	Lokasi (dusun)	Jumlah Peserta		
		Laki-laki	Perempuan	Total
24 April 2016	SD BPD Dusun Huhua	24	1	25
	SD Inpres Anauni	14	5	19
25 April 2016	Balai Dusun Pulau Kasuari	11	10	21
	Rumah Kadus Naiselan	16	0	16

Masukan dalam konsultasi publik di 4 dusun, pada umumnya fokus pada 3 BAB, dari 13 Bab rancangan peraturan lokal ini. Yaitu: Bab III. Tentang Daerah Perlindungan Laut (DPL), Bab VII tentang Kawasan Perlindungan Pantai (Pasal 19 larangan penebangan mangrove) dan Bab XII tentang Penerimaan dan

Pemanfaatan pada pasal 27 ayat 4 tentang pembayaran hasil pemanfaatan kawasan pesisir. Masukan masyarakat menjadi acuan Tim penyusun dan LPPM untuk merevisi rancangan aturan local sebelum di finalisasi ditingkat negeri. **(Lihat Catatan masukan untuk perbaikan draft aturan local pada rancangan aturan local #2)**

Aktivitas 1.5: Finalisasi Aturan Lokal Di Tingkat Negeri

Pertemuan finalisasi rancangan aturan local tingkat Negeri difasilitasi oleh pemerintah Negeri dan berlangsung di Baileo Negeri Buano Utara pada **tanggal 27 April 2016**. Pesertannya adalah perwakilan Pemerintah Negeri, Kepala-kepala Soa, Kepala Dati dan BPD serta tokoh masyarakat dan Tokoh Agama. Total peserta pertemuan sebanyak **20 orang**.

Pertemuan finalisasi draf aturan local difasilitasi oleh **Piet Wairissal**, dan dibuka oleh pemerintah negeri. Dalam pertemuan ini mengagendakan 3 hal (a). Presentasi rancangan aturan local (b). Tanya Jawab/masukan perbaikan, (d). Perbaikan rancangan Aturan local sesuai masukan dan (e). Penyerahan secara simbolis draf peraturan local kepada pemerintah Negeri Buano Utara. Beberapa catatan penting dari pertemuan ini adalah:

1. Fungsi dan kewenangan kewang dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir perlu dipertegaskan dalam aturan tersebut
2. Peran pemerintah Negeri untuk dapat memperhatikan operasional dan kesejahteraan kewang. Jika memungkinkan operasional kewang didukung juga oleh Dana Negeri/negeri.
3. Wilayah-wilayah yang belum masuk dalam DPL namun berpotensi dirusak kedepan akan diatur oleh Negeri dalam rapat negeri dan dapat membuat keputusan untuk penambahan wilayah DPL baru.
4. Penetapan income akan dibicarakan dalam Saniri Negeri oleh kepala-Kepala Soa dan Pemerintah Negeri
5. Membuat beberapa aturan tambahan seperti: **(a)**. Penetapan Tugas dan Fungsi Kewang (termasuk penerbitan Surat Tugas Kewang dari Kepala Soa). **(b)**. Mekanisme penetapan dan tatacara penagihan income. **(c)**. Aturan penebangan bakau dan **(d)**. Membuat dan menetapkan Alur komunikasi dan koordinasi Kelompok Pengawas Pesisir Negeri Buano Utara dan Kewang, mendorong agar ada surat keputusan penetapan kelompok pengawasan perlindungan pesisir dari pemerintah negeri

Komitmen 3 orang kepala soa, BPD bersama peserta pertemuan untuk segera mendorong dilakukannya sosialisasi rancangan aturan local pada Saniri Negeri (rapat negeri dan Bapak Raja untuk mengagendakan peninjauan dan sekaligus mengkonsultasikan peraturan negeri ke Kabupaten sebelum ditandatangani oleh raja dan BPD.

Satu dokumen rancangan peraturan local juga disampaikan LPPM ke DKP, KLH SBB dan DKP Provinsi untuk dipelajari sekaligus sebagai referensi. Secara strategis LPPM juga berharap mereka dapat membantu mendorong pemerintah negeri Buano Utara untuk segera menetapkan peraturan dan berlakukan peraturan tersebut. **(Lihat rancangan aturan local pada rancangan aturan local final)**

Output (Luaran) 2: Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan

Output 2 berhasil dicapai hingga akhir pelaksanaan program, yakni "Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan". *Indicator 1 output 2 yaitu "Masyarakat*

berpartisipasi dalam mencegah aktivitas yang merusak kawasan pesisir Buano utara sejak bulan VI program” dipenuhi dengan melaksanakan beberapa aktivitas yaitu:

Aktivitas 2.1: Membentuk kelompok perlindungan (KPS).

Pembentukan KPS dilaksanakan bersamaan dengan penguatan kapasitas anggota KPS. Ke-dua aktivitas ini dilaksanakan selama 3 hari. Untuk implementasi aktivitas ini, LPPM melakukan sedikit memodifikasi tahapan strategi pelaksanaan dimana pelatihan pengawasan pesisir dilakukan mendahului pembentukan KPS. Hal ini dimaksudkan agar perwakilan masyarakat yang nantinya menjadi anggota KPS adalah mereka yang secara sukarela dan sadar serta mereka yang menunjukkan berkomitmen tinggi untuk terlibat sebagai anggota kelompok pengawasan pesisir, tanpa ada paksaan ataupun karena “ditunjuk” oleh kepala dusun. Alasan lain yang dianggap strategis sebagai salah satu exit strategy program dimana kelompok yang terbentuk secara mandiri dapat mengorganisir masyarakat tanpa ada pengawasan/support dari pihak manapun untuk melanjutkan pendekatan yang telah dilakukan oleh program. Kelompok ini juga sekaligus dapat memiliki salah satu peran penting dalam mengerahkan pembangunan berbasis pesisir sekaligus merupakan salah satu asset yang dapat dimanfaatkan SDAny untuk pembangunan Negeri Buano Utara kedepan.

Satu kelompok pengawas pesisir (KPS) telah terbentuk pada tanggal **22 Juli 2016**, dalam satu pertemuan yang berlangsung di gedung SD BPD Dusun Huhua Negeri Buano Utara. Pembentukan kelompok pengawas bertugas untuk memantau dan menjaga pesisir Buano utara. KPS berjumlah **22 orang** mereka mewakili unsur nelayan, pengusaha perikanan dan tokoh masyarakat, masing-masing Dusun Huhua 4 orang, Anauni 1 orang, Pulau Kasuari 3 orang, Negeri Besar 4 orang, Dusun Naiselan 3 orang. Hadir pula dalam pertemuan ini adalah Kewang 5 orang dan Pemerintah Dusun, 2 orang (kepala dusun). Komposisi pengurus yang disepakati peserta pertemuan adalah 1 (satu) orang koordinator Umum dan masing-masing 1 (satu) orang Koordinator Wilayah di Negeri Induk dan 4 (empat) Dusun.

Mekanisme rekrutmen peserta pembentukan KPS dari 4 dusun dilakukan melalui pengumuman/pemberitahuan kepada masyarakat/kepala dusun dalam kegiatan kajian partisipatif dan uji publik peraturan lokal oleh LPPM. Setelah itu nama-nama calon peserta/anggota KPS dikirim ke LPPM melalui staf lapangan untuk selanjutnya dimasukkan dalam daftar undangan calon peserta pembentukan sekaligus pelatihan penguatan kapasitas KPS, sedangkan usulan nama-nama peserta dari Negeri induk diusulkan oleh BPD dan Kepala Soa.

Pemilihan koordinator umum dan koordinator wilayah dilakukan secara terpisah. Untuk pemilihan koordinator umum, peserta secara demokratis memilih dan mengusulkan kandidat melalui usulan nama dalam gulungan kertas, setelah itu dibacakan secara terbuka dan memberikan skoring untuk masing-masing nama terpilih. Suara terbanyaklah yang akhirnya dipercayakan sebagai koordinator umum. Sedangkan untuk pemilihan koordinator wilayah di dusun-dusun, proses penunjukan dilakukan secara internal oleh peserta yang berasal dari dusun masing-masing. Kepengurusan KPS yang terbentuk bersepakat untuk menambah anggota kelompok mereka dan rekrutmen anggota akan dilakukan oleh masing-masing dusun. Fasilitator pada pertemuan pembentukan KPS ini adalah **Piet Wairissal**. Proses pemilihan pengurus KPS dilakukan setelah pelatihan teknis/penguatan kapasitas, hal ini dimaksudkan agar apabila setelah mendapat pengetahuan teknis, mungkin saja ada peserta yang tidak mau bergabung.

Pelatihan teknis penguatan kapasitas KPS, **telah selesai** dilaksanakan LPPM pada tanggal **20-21 Juli 2016**, bertempat di SD BPD Huhua. Pelatihan ini diikuti oleh **22 orang** masing-masing 2 orang Kepala Dusun (Huhua dan Anauni), Kewang 5, Dusun Huhua 4 orang, Naiselan 3 orang, Anauni 1 orang, Pulau Kasuari 3 orang Negeri induk 4 orang. Pelatihan ini difasilitasi oleh **Bpk. Junus Jefri Ukru** (Pimpinan Baileo Maluku). Sesi pelatihan dimulai dengan pengantar oleh Direktur LPPM, Sambutan pembukaan oleh Raja Negeri Buano Utara yang diwakili oleh Ketua BPD, perkenalan dan Selanjutnya proses pelatihan. Sebelum fasilitator memfasilitasi pelatihan, Koordinator Program, **Noni Tuharea** menjelaskan maksud dan tujuan pelatihan dan pembentukan KPS.

Pelatihan KPS dirancang untuk memperkuat aspek pengorganisasian, karenanya dalam **3 hari** pelatihan ini, peserta dituntut untuk mampu **menemukanali persoalan seputar kawasan pesisir** dan bagaimana **peran serta KPS dalam mengorganisir kelompoknya serta masyarakat** untuk mengawasi dan mengelola kawasan pesisir dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam pelatihan ini kedua isu diatas menjadi bagian sangat penting, karena hal ini akan berkontribusi terhadap kerja-kerja kelompok setelah terbentuk. Soliditas kelompok dalam mengorganisir masyarakat, pemahaman kelompok terhadap persoalan-persoalan kawasan pesisir adalah hal yang paling penting sebelum mereka merancang dan menjalankan tugas mereka.

5 isu utama di kawasan pesisir yang muncul selama pelatihan, juga memperkuat temuan-temuan dari hasil kajian partisipatif yang telah dilakukan sebelumnya. Isu utama ini antara lain: (1) Penguatan kesadaran masyarakat, (2). Penguatan Sistem dan Nilai Adat dalam perlindungan kawasan pesisir, (3), Penguatan aturan dan kebijakan perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir, (4) pengawasan kawasan pesisir, dan (5) program pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan kepada KPS pasca pelatihan masih diperlukan. Satu tindakan cepat LPPM telah melaporkan keberadaan KPS kepada DKP Provinsi maupun Kabupaten, harapannya DKP memiliki referensi tentang kelompok KPS dan dapat bekerja sama tetapi sekaligus juga membuka peluang untuk mendapatkan informasi dan akses bantuan-bantuan pemerintah. Satu surat penetapan tentang keberadaan KPS di Negeri harus dibuat oleh Raja, sayangnya hal ini masih terkendala karena seringnya Raja tidak tinggal di Negeri. Namun demikian dipenghujung program LPPM telah bertatap muka dengan Raja Negeri Buano untuk membicarakan aspek legalitas KPS, Raja berjanji akan segera menetapkan KPS dalam sebuah surat keputusan resmi Pemerintah Negeri Bauno Utara. **(Struktur kelompok, Uraian tugas anggota kelompok, Rencana Aksi kelompok dan lembaga dapat dilihat pada laporan kegiatan**

Indicator 2 output 2 yaitu "Minimal 25% warga masyarakat di Negeri Buano Utara tidak melakukan aktivitas merusak kawasan pesisir Buano Utara sejak bulan VI Program". Indicator 2 output 2 dipenuhi dengan melaksanakan beberapa aktivitas yaitu:

Aktivitas 2.2. Melakukan penyadartahuan untuk untuk mendorong pengawasan dan perlindungan kawasan pesisir secara partisipatif di Buano Utara

Aktivitas ini dilakukan melalui berbagai metode, yaitu melakukan diskusi tematik, cetak dan distribusi media publikasi konservasi, penanaman mangrove, pengawasan kawasan pesisir oleh KPS.

Diskusi tematik bulanan.

Kelompok Pengawas Pesisir (KPS) bersama LPPM telah memfasilitasi dan mengorganisir diskusi tematik di 4 dusun dan negeri Induk bersama perangkat Negeri/Dusun yang melibatkan masyarakat pada tanggal . Diskusi ini baru berlangsung di Bulan ke IX program terlambat dari yang direncanakan di LFA, hal ini dikarenakan proses transfer dana dari Burung Indonesia mengalami keterlambatan sehingga baru terlaksana pada bulan November-Desember. Tema diskusi adalah : **'Mangrove untuk kehidupan yang lebih baik'**. Tema ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat dan mereka memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap kawasan pesisir serta habitat yang hidup di Buano Utara. Dua orang narasumber diidentifikasi oleh LPPM dari DKP dan KLH SBB untuk menyampaikan materi dalam diskusi ini, yaitu Sylvia Sitania (BLH SBB) dan Margaretha Pelupessy (DKP SBB).

153 Orang peserta mendapat informasi lengkap tentang manfaat dan fungsi mangrove di pesisir, tetapi juga bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah dan kesehatan lingkungan. Secara khusus narasumber dari Perikanan menyinggung perubahan iklim,

Tanggal	Lokasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15 November 2016	Naiselan	17	5	22
	Huhua	11	30	41
	Anauni	16	14	30
3 Desember 2016	Pulau Kasuari	29	3	32
	Neg. Induk	24	4	28
	Total peserta	97	56	153

pengelolaan laut, kartu nelayan, kartu pembudidaya serta asuransi nelayan. Agar KPS dan masyarakat tidak berjalan sendiri dalam melakukan tugas pengawasan pesisir, secara khusus Narasumber mendorong masyarakat untuk dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten. karena ada beberapa program pemerintah kabupaten yang dapat diakses oleh masyarakat, antara lain Kalesang Negeri, Penanaman mangrove yang ada di BLH serta pendampingan usaha oleh DKP. (***Lihat laporan kegiatan***)

Cetak dan distribusi Media Publikasi.

Diskusi pengembangan media dilakukan di LPPM, membuat *brief* poster dan brosur, identifikasi dan kontak disainer dilakukan oleh staf LPPM. Draf media direview dan dikirim ke Burung Indonesia untuk mendapatkan masukan. Catatan revisi dari Burung Indonesia membantu finalisasi rancangan media sebelum di cetak.

Bidding proses untuk mendapatkan vendor/percetakan dilakukan oleh staf finance. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek kemahalan dan kualitas, maka diputuskan percetakan di Jakarta pada Percetakan Lima Warna.

Jumlah media yang dicetak sebanyak 1000 exp. brosur mangrove, 100 exp. poster mangrove dan 100 exp. Jumlah ini lebih banyak dari yang direncanakan di LFA sebanyak 600 exp yang terdiri dari (brodur 500 dan poster 100 exp). Hal ini terjadi karena kebutuhan lapangan serta budget pada bagian ini masih cukup untuk digunakan.

Media publikasi kemudian didistribusikan dalam berbagai kegiatan penyadartahuan seperti diskusi tematik, penanaman mangrove serta berbagai elemen di masyarakat. (***Daftar distribusi media terlampir. (Lihat laporan kegiatan)***)

Penanaman mangrove.

Sebagai bentuk kesadaran masyarakat dan partisipasi untuk menjaga kawasan pesisir khususnya hutan mangrove atas kerusakan yang terjadi pada beberapa titik di pesisir Buano Utara, terutama akibat penebangan untuk pemukiman, kebutuhan kayu bakar dan pembuatan pagar, maka sampai akhir program ini LPPM dan KPS telah memfasilitasi penanaman mangrove bersama masyarakat, murid-murid sekolah dasar di Dusun Anauni, Huhua dan Naiselan . aksi ini telah berhasil menanam **1.989** anakan mangrove jenis *Rhizapora*, *Avicenia* dan *Bruiguera* dengan melibatkan setidaknya **101** siswa SD, **7** orang Tenaga Pengajar, **13** orang anggota masyarakat dan **7** anggota KPS di **3** lokasi, yaitu:

- Dusun Huhua, 1.324 anakan *Rhizapora* dan *Avicenia*. 37 orang siswa SD BPD Huhua, 2 orang tenaga Pengajar, 8 orang anggota masyarakat dan 2 orang KPS terlibat
- Tanjung Naiselan, 315 anakan mangrove *Rhizapora*. 30 orang siswa SD Neg. Naiselan, 3 orang tenaga Pengajar, 2 orang anggota masyarakat dan 3 orang KPS terlibat
- Nusa Tea, 350 anak *Bruiguera*. 34 orang siswa SD BPD Huhua, 2 orang tenaga Pengajar, 3 orang anggota masyarakat dan 1 orang KPS terlibat.

KPS telah mengambil tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Dusun, Kepala-kepala Sekolah dan masyarakat untuk mengorganisir penanaman mangrove. Penanaman dilakukan dengan cara menanam propagule yang berasal dari jenis mangrove yang ada masing-masing lokasi. Khusus untuk mangrove jenis *Bruiguera* yang tumbuh di Nusa Te'a, bibitnya harus diambil di Dusun Huhua. Dengan pertimbangan jarak pengambilan bibit jauh dari lokasi, maka dilakukan kebijakan untuk membeli (membayar) masyarakat untuk mengumpulkan bibit dengan jumlah sebesar Rp.2.500 untuk setiap anakan.

Monitoring pertumbuhan mangrove

Untuk memastikan mangrove yang ditanam berhasil atau gagal, maka KPS bersama LPPM dan masyarakat melakukan pemantauan dan monitoring di lokasi penanaman. Dari jumlah 1.989 anakan mangrove yang ditanam sampai akhir program ada sebanyak 1.348 yang hidup masing-masing terdapat di (Huhua, 973 anakan; Naiselan 157 anakan; dan Pulau tea 218 anakan). Mangrove yang terjaga kesintasannya paling banyak ada di Huhua. Pada lokasi Tanjung Naiselan kurang lebih 50% anakan mangrove tidak bisa bertahan karena ombak. Sedangkan di Pulau Tea, dicurigai anakan mangrove yang mati/kering diakibatkan karena suhu panas yang tinggi sehingga anakan mangrove tidak mampu beradaptasi dengan lokasi (khususnya bibit yang dibawa dari Huhua). (***Lihat laporan kegiatan***)

Monitoring KPS untuk penangkapan ikan dan pengambilan karang laut.

Satu format laporan sederhana dirancang untuk membantu KPS mendokumentasikan aktivitas monitoring dan temuan lapangan. 3 orang ketua KPS masing-masing dari Naiselan, Pulau Kauari dan Huhua melaporkan aktivitas mereka seperti melarang dan menegor kapal penangkap ikan hias di pesisir Buano Utara. Kapal-kapal penangkap ikan yang membuang jangkar di sembarang tempat khususnya di antara Pulau Kasuari dan Pua. Berkoordinasi dengan Polair melalui telepon untuk melaporkan kapal-kapal penangkap ikan yang membuang jangkar di pesisir Buano Utara tanpa izin. (***Lihat laporan monitoring dan pengawasan KPS***)

Aktivitas 2.3: Melaksanakan pelatihan vokasional pengelolaan sumber daya pesisir berbasis lingkungan berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya pesisir secara tidak bertanggung jawab sering meninggalkan berbagai persoalan sosial maupun ekologi. Terbatasnya lahan pertanian serta kondisi tanah yang tidak subur menjadi faktor yang paling menyebabkan masyarakat bergantung kehidupannya pada hasil laut. Hal ini dialami oleh masyarakat di Buano Utara, dimana laut menjadi tempat mencari nafkah. Untuk menjamin keberlanjutan, LPPM telah melakukan pelatihan untuk masyarakat agar mampu mengelola sumber daya alam pesisir secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. pelatihan kerambah Jaring Apung dan pembesaran kepiting bakau yang merupakan salah satu rekomendasi usaha dalam pemetaan potensi dan kajian partisipatif ini, harapannya dapat mengurangi kerusakan di pesisir dan mampu menambah pendapatan mereka.

Dua pelatihan masing-masing Kerambah Jaring Apung dan Teknik Pembesaran Kepiting Bakau telah dilakukan kepada masyarakat, dengan harapan pendapatan mereka meningkat dan secara langsung dapat berkontribusi terhadap kawasan pesisir.

Satu diskusi dilakukan di kantor LPPM untuk merancang dan mempersiapkan pelatihan vokasi. Tor, jadwal, formulir pendaftaran dan kriteria peserta dibuat untuk melakukan rekrutmen peserta dan instruktur. Selanjutnya formulir distribusikan kepada masyarakat/calon peserta untuk diisi. Koordinator Program dan Fild Staf melakukan wawancara calon peserta yang telah mengisi formulir.

25 dari 27 orang yang mendaftar untuk pelatihan KJA dan 34 orang dari 50 orang yang mendaftar untuk pelatihan Pembesaran Kepiting Bakau dinyatakan lolos dan direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan. Salah satu kriteria penting adalah peserta dapat berkontribusi untuk pelatihan misalkan, tidak mendapat uang transport, makan selama pelatihan ditanggung sendiri termasuk kebutuhan material lokal berupa kayu dan bambu menjadi bagian yang ditanggung untuk pembuatan kerambah dan kandang pembesaran kepiting.

Rekrutmen instruktur baik secara individu maupun lembaga dilakukan. 7 orang calon dinilai kesiapannya oleh LPPM. hasil seleksi akhirnya terpilih Masing-masing 1 orang instruktur dan 1 orang praktisi (pengusaha KJA) dan 1 pelatih pembesaran kepiting bakau dari **Balai Pendidikan Pelatihan Perikanan (BPPP)** Ambon setelah mendapat izin dari Kepala Balai. Bahan ajar serta kebutuhan material pelatihan di hitung oleh pelatih dan dikirimkan ke LPPM untuk pengadaan.

Total peserta yang berpartisipasi dalam 2 pelatihan vokasi adalah sebanyak 58 orang, masing-masing dari Dusun Huhua (45 orang), Anauni (3 orang) dan Pulau Kasuari (10 orang).

Pelaksanaan Pelatihan Kerambah Jaring Apung

Pelatihan KJA berlangsung selama 6 hari, terhitung dari tanggal 28 Agustus – 2 September 2016, dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang. Pelatihan ini berlangsung di Dusun Huhua. Dengan Instruktur inti

Bapak Purwoto dari Balai Pelatihan Perikanan Poka (BPPP) Ambon dan **La Musu** (praktisi/pengusaha KJA di Waiheru Kota Ambon).

Peserta pelatihan KJA ini hanya diikuti oleh penduduk Dusun Huhua, karena pertimbangan (1) Tingkat kemiskinan, (2) kesejangan kesempatan dan keterbatasan modal, serta (3) aspek keberlanjutan perlindungan kawasan pesisir di pada masyarakat Huhua karena mereka merupakan komunitas asli Buano. Mereka diharapkan dapat menjadi ujung tombak kegiatan perlindungan kawasan pesisir. Hal ini cukup beralasan karena wilayah pesisir merupakan hak ulayat mereka. Dukungan terhadap keputusan melakukan pelatihan kepada masyarakat Huhua telah didukung oleh 3 dusun lain, dan mereka menanggung keputusan LPPM untuk memprioritaskan masyarakat Dusun Huhua sudah sesuai.

Pelatihan KJA dilakukan dengan berpatokan pada alokasi waktu yang ditentukan instruktur diantaranya **48 jam** pelajaran selama 6 hari, dan **70%** adalah praktek dan **30%** teori (baik dalam ruangan maupun di lapangan). Materi pelatihan antara lain *menentukan lokasi, parameter kualitas air, penanganan bibit, pembuatan kerambah, pemberian pakan, penyakit dan hama, memantau pertumbuhan, panen dan analisa usaha*.

Hari terakhir pelatihan instruktur melakukan uji kompetensi dengan mengajak peserta untuk mempraktekkan kembali materi yang telah didapat dengan cara praktek menghitung mata jarig, menjahit, dan menukur. Ada kurang lebih 75% peserta dari 25 orang dinyatakan mampu dan kompeten merencanakan dan membuat KJA.

Sampai akhir pelatihan peserta telah menyelesaikan 3 kotak KJA yang berukuran 3x3m dan menjahit 5 jarig KJA ukuran 3x3x3 meter serta waring 2 unit ukuran 3x1.5x3 meter untuk pembesaran bibit.

Pembentukan Kelompok KJA: Peserta pelatihan selanjutnya dibentuk dalam satu kelompok untuk memudahkan Kelompok usaha KJA bersamaan dengan selesainya pelatihan. Kelompok ini memiliki struktur masing-masing Ketua: dipercayakan kepada **Ramadhan Hitimala**, Sekertaris **Anshar Tohalisa**, Bendahara **Ali Tamalene**. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas, anggota kelompok dibagi lagi dalam kelompok kerja masing-masing: Kelompok Perawatan, Bibit dan Pakan. ***(Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Laporan pelatihan vokasional dan Laporan pendampingan)***

Pelaksanaan Pelatihan Pebesaran Kepiting Bakau

Pelatihan Pembesaran Kepiting Bakau berlangsung dari tanggal 25 -27 November 2016, yang dipusatkan di Dusun Huhua dan diikuti oleh 32 orang peserta, yang terdiri dari Huhua 21 orang, Anauni 3 orang dan Pulau Kasuari 10 orang. Instruktur pelatihan adalah Bapak **Rushelan Sudharna** dari BPPP Ambon.

Pelatihan Pembesaran Kepiting Bakau selama **24 jam** pelajaran selama 3 hari, dengan pembagian **70%** adalah waktu praktek dan **30%** adalah teori. Materi pelatihan diantaranya *pengenalan jenis kepiting bakau, teknik pembesaran, pemberian pakan, memantau pertumbuhan, pemeliharaan dan panen*

Dihari I, peserta mendapat materi teori yang dilakukan selama kurang lebih 4 jam dan dilanjutkan dengan materi praktek pembuatan kandang kepiting. Untuk kebutuhan praktek, kelompok sudah terbentuk. Peserta memilih temannya 3-5 orang untuk selanjutnya menjadi kelompok usaha permanen.

Praktek: Hari I pembuatan kandang kepiting dilakukan di masing-masing lokasi, hal ini untuk mempermudah peserta/kelompok menempatkan kandangnya di lokasi yang dipilih. Kelompok dari Pulau Kasuari memilih untuk praktek di Pulau kasuari, sedangkan Anauni bergabung dengan Huhua, karena lokasi penempatan kandang peserta anauni ditempatkan di dusun Huhua.

Hari II: Praktek pembuatan kandang di hari kedua dilakukan di Pulau Kasuari setelah instruktur melakukan pendampingan pembuatan dan penancapan kandang di Huhua. **Hari ke III:** dilanjutkan dengan Perakitan Kandang Kepiting di Huhua sekaligus acara penutupan.

Dalam amatan LPPM selama pelatihan berlangsung, metode pembelajaran yang digunakan oleh instruktur dirasakan sangat mendorong partisipasi dan komitmen peserta untuk kerja tekun dan focus. Sampai akhir Pelatihan 5 kerambah berhasil merakit dan menancapkan kandang dilokasi pembesaran. Setiap kerambah menampung 8 – 12 ekor bibit kepiting dengan berat rata-rata 50 gr/ekor. Penyediaan bibit peserta diwajibkan untuk mencari bibit sendiri. Untuk menangkap bibit peserta melibatkan anak-anak mereka dan salah satu kelompok memilih untuk membeli bibit dari anak-anak remaja yang sering mencari kepiting, dengan harga per ekor Rp 1.000. ***(Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Laporan pelatihan vokasional dan Laporan pendampingan)***

Pendampingan dan Menyediakan akses pembiayaan bagi kelompok Usaha

Pasca pelatihan, pendampingan intensif dilakukan kepada kelompok-kelompok usaha yang telah terbentuk. Pendampingan dilakukan untuk memperkuat manajemen dan kerjasama anggota kelompok, membuka akses pembiayaan dan dukungan lainnya. Beberapa temuan selama pendampingan antara lain:

- Anggota kelompok masih belum focus mengelola usaha mereka
- Jumlah anggota kelompok yang terlalu banyak di KJA, menimbulkan sikap malas tahu dengan tugas yang telah diberikan, akibatnya berdampak terhadap hal lain.
- Keterampilan teknis mengelola usaha masih rendah. Kelompok masih memerlukan pendampingan intens dalam waktu lama

Informasi dan kesempatan untuk mendapat dukungan bantuan dan pendampingan kepada kelompok sampai akhir periode program ini, LPPM belum dapat merealisasikan hal ini, terutama bantuan dari pihak Dinas terkait (DKP, Koperasi) hal ini berkaitan dengan pembentukan dan kesiapan administrasi/legalitas kelompok belum semuanya selesai. Namun demikian Usaha untuk hal ini masih tetap dilakukan, misalkan melalui Narasumber DKP dalam pertemuan tematik, telah melaporkan keberadaan kelompok kepada Kadis, dan telah memasukan nama kelompok ke data base DKP SBB, sebahagian anggota kelompok juga telah difasilitasi untuk membuat kartu nelayan. Pasca pelatihan, instruktur KJA (La Musu) telah menyumbangkan 2 piece jaring KJA untuk kelompok. Jarring ini telah dimanfaatkan untuk menangkap bibit ikan bubara. ***(Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Laporan pelatihan vokasional dan Laporan pendampingan)***

IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas (tidak perlu diisi apabila program TIDAK menasar pada Arahan Strategis 1)

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen verifikasi
	(perburuan, perdagangan)	(jumlah ancaman turun dengan prosentasi tertentu pada saat akhir program)	(Survey/monitoring baseline dan endline)

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
KBA Pulau Buano	<ul style="list-style-type: none"> - Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat - Kawasan Perlindungan Pantai dan pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> - Total Zona inti 6 ha dan Zona Penyangga 23 ha. - Sepanjang pesisir pantai, dengan jarak 100 m kearah darat dari garis panatai dan 50 m kearah laut dari garis pantai - Hutan Mangrove seluas 181,03 ha 	Rancangan Pearaturan Negeri tentang Perlindungan Kawasan Pesisir Negeri Buano Utara

3. Perlindungan kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
Nusa Esuna dan Nusa Mananut	DPL, kawasan konservasi laut yang dikelola secara local oleh negeri, dan akan menjadi usulan bagi	Total Zona inti 6 ha dan Zona Penyangga 23 ha. (Belum ditetapkan)	Rancangan Pearaturan Negeri tentang Perlindungan Kawasan Pesisir Negeri Buano Utara

	pembentukan KKPD/KKLD ke Provinsi Maluku		
--	--	--	--

4. Penerima manfaat

a. Karakteristik penerima manfaat (*silahkan tera checklist pada tiap kolom yang relevan*)

Nama Komunitas	Jenis Komunitas										
	Ekonomi Subsisten	Small landowners	Masyarakat hukum adat/komunitas lokal	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Komunitas Perkotaan	Lainnya	Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
								50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa
Masyarakat Buano Utara			✓							✓	

b. Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih		
Meningkatnya ketersediaan pangan		
Meningkatnya akses ke sumber energi (listrik)		
Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, pendidikan dll.)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim		

Kepemilikan lahan yang jelas		
Pengakuan atas kearifan lokal	6.883	6.789
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan	225	46
Peningkatan akses atas jasa lingkungan		
Pelatihan (sebutkan jenis pelatihan yang didapat oleh penerima manfaat):		-
1. Pelatihan penguatan kapasitas kelompok pengawasan pesisir	22	-
2. Pelatihan Kerambah Jaring Apung	25	-
3. Pelatihan pembesaran kepiting bakau	5	27
Lain-lain:		
1. Diskusi tematik	97	58
Total Penerima Manfaat	7.257	6.920

5. Regulasi/kebijakan lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (nasional, lokal, Negeri)	Topik	Hasil yang Diharapkan
Peraturan Lokal/Perneg	Negeri	Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Negeri dan BPD mengesahkan Perneg 2. Masyarakat dan pemerintah memiliki rencana perlindungan kawasan pesisir secara bertanggung jawab dan berkelanjutan 3. Adanya peraturan-peraturan turunan dari perneg yang disusun

6. Jaringan kerja/forum multipihak

(jaringan atau kemitraan yang terbentuk sebagai hasil dari program yang dilaksanakan. Jaringan atau kemitraan ini berkaitan dengan capaian program, contoh : forum pengelolaan daerah tangkapan air,

yang bertujuan sebagai forum komunikasi dan kerja bersama parapihak dalam pengelolaan daerah tangkapan air.)

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (nasional, lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan

7. Bentang alam produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi

V. PEMBELAJARAN

Isu	Keberhasilan / Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
Penyusunan Aturan Lokal	Berhasil dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data awal dilakukan dengan berbagai metode partisipatif - Pengungkapan masalah kebiasaan-kebiasaan dan kondisi kekinian membantu penyusunan aturan lokal - DPL - Tim penyusun Rancangan aturan lokal adalah masyarakat setempat 	<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan aturan lokal dibuat sesuai kebutuhan dan situasi lokal - Walaupun belum disahkan oleh Pemerintah Negeri masyarakat mengetahui dan mulai menjalankan rancangan aturan yang telah buat tersebut 	Memperkuat koordinasi dengan Raja dan BPD Negeri Buano untuk segera mengesahkan rancangan peraturan lokasi tentang Perlindungan Kawasan pesisir
DPL berbasis masyarakat	Berhasil dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Perlibatan akademisi dan praktisi dari LIPI dan UNPATTI dalam menentukan DPL - Ada dukungan dari Tokoh-tokoh adat selaku pemimpin/pemilik ulayah (kawasan adat) pada 	<ul style="list-style-type: none"> - Nusa Esuna dan Nusa Manaut ditetapkan sebagai DPL dengan luas Zona inti mencapai 6 ha dan Zona penyangga seluas 23 ha - Nusa Tea dengan luas 1 ha, ditetapkan 	1. Memperkuat koordinasi dengan Raja dan BPD Negeri Buano untuk segera mengesahkan rancangan peraturan lokasi tentang

Isu	Keberhasilan / Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
		<p>kawasan-kawasan yang dilindungi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat memahami, menyetujui dan berpartisipasi dalam penentuan lokasi-lokasi perlindungan di kawasan pesisir negeri Buano Utara 	<p>sebagai kawasan wisata bahari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditetapkannya kawasan perlindungan Pesisir di sepanjang pantai Negeri Buano Utara, dengan batas 100 meter kearah darat dan 50 meter kearah laut 	<p>Perlindungan Kawasan pesisir</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan KPS dalam pengawasan kawasan-kawasan perlindungan
Membentuk dan Melatih KPS	Berhasil dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta pelatihan mewakili setiap wilayah administrasi pemerintahan Negeri Buano - Ada rasa kepemilikan dan keinginan peserta untuk menjaga kawasannya 	KPS mampu melakukan pengawasan, meskipun dalam bentuk sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan KPS dalam pengawasan kawasan-kawasan perlindungan 2. Mendorong Pemerintah negeri untuk segera menerbitkan Surat keputusan tentang Pembentukan KPS 3. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten / provinsi dalam rangka penguatan kapasitas dan pemberdayaan KPS
Diskusi tematik	Berhasil dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> - Narasumber diskusi merupakan staf pemerintah - Pertemuan dilakukan secara santai, namun serius 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat mampu menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi terkait situasi di sekitar kawasan pesisir - Pemerintah siap mendukung kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan aktivitas penyadartahuan untuk pelestarian lingkungan 	
Penanaman mangrove	Kurang berhasil	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada partisipasi aktif dari masyarakat (orang dewasa) - Penanaman dilakukan pada musim yang tidak tepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan pertumbuhan mangrove yang ditanam belum dilakukan secara konsisten 	Memilih waktu penanaman dengan memperhatikan kalender musim angin/gelombang

Isu	Keberhasilan / Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
			- Anakan yang ditanam mati	
Pelatihan Vokasional	Berhasil dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pelatihan dilakukan secara baik - Komitmen dan motivasi peserta tinggi untuk memiliki usaha - Ada kontribusi peserta sebagai bentuk kepemilikan pelatihan - Instruktur pelatihan kompeten 	Kerjasama kelompok selama pelatihan sangat baik dan mampu menghasilkan 3 kotak kerambah	Memperkuat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten / provinsi dalam rangka penguatan kapasitas dan membuka akses pembiayaan bagi kelompok usaha
Pendampingan kelompok usaha	Kurang berhasil	<ul style="list-style-type: none"> - Staf pendamping tidak memiliki kapasitas pendampingan usaha - Kelompok belum fokus mengerjakan usaha kelompok yang ada - Belum ada akses pembiayaan bagi kelompok baik dari pemerintah maupun swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Gagal panen karena bibit ikan/kepiting mati karena kurang pakan - Tugas-tugas kelompok tidak dikerjakan - Tidak ada dukungan permodalan untuk menata kembali usaha yang ada. 	Monitoring dan evaluasi instruktur secara reguler, minimal 3 bulan sekali Mendorong monitoring kelompok oleh SKPD melalui penyuluh perikanan.

VI. STATUS KEUANGAN

- a. Pemasukan : Rp. 247.81.845
- b. Pengeluaran : Rp. 245.687.439
- c. Saldo : Rp. 1.594.406